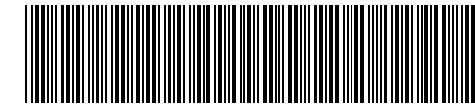




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 063.01.1.445155/2025**



DS:0174-8192-0003-3916

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 04

Tanggal : 01 Juli 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(063)	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(445155)	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Sebesar	:	Rp. 50.358.861.000	(LIMA PULUH Miliar TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

07 KESEHATAN
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	36.752.204.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	13.606.657.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 50.358.861.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap pengguna anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024

A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0174-8192-0003-3916

Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	50.358.861.000
DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp.	3.223.069.000
DR.4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Rp.	6.692.731.000
DR.4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Eksport Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Rp.	11.315.272.000
DR.4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Rp.	9.310.689.000
DR.4127	Registrasi Obat	Rp.	12.654.921.000
DR.4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Rp.	7.162.179.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 1

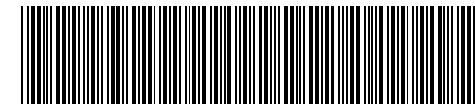
Program	:	063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan			50.358.861.000
Kegiatan	:	3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			3.223.069.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	3165.BKB	Pemantauan produk	1,00	laporan	3.223.069.000
Rincian Output	:	01 BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.00	laporan	3.223.069.000
Kegiatan	:	4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor			6.692.731.000
	:					
Klasifikasi Rincian Output	2	4122.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	10,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.305.000.000
Rincian Output	:	01 ABG.001	Kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan	10.00	Rekomendasi Kebijakan	2.305.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	4122.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	490,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	781.046.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	490.00	dokumen	781.046.000
Klasifikasi Rincian Output	4	4122.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	167,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	3.606.685.000
Rincian Output	:	01 QIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan (PN)	167.00	Keputusan	3.606.685.000
Kegiatan	:	4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif			11.315.272.000
	:					

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 2

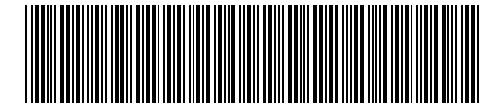
Klasifikasi Rincian Output	5	4123.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	22.500,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	747.994.000		
Rincian Output		01	BAH.001	Surat Keterangan Eksport Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu	22500.00	dokumen	747.994.000	
Klasifikasi Rincian Output	6	4123.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.500,00	Produk, Laporan, Keputusan	2.427.804.000		
Rincian Output		01	BIA.001	Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan	140.00	Laporan	1.654.100.000	
		02	BIA.002	Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan	1360.00	Laporan	773.704.000	
Klasifikasi Rincian Output	7	4123.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	10,00	Orang, Laporan	2.500.000.000		
Rincian Output		01	BIB.001	Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan	10.00	Laporan	2.500.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	8	4123.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	6.012,00	Produk, Laporan, Keputusan	5.639.474.000		
Rincian Output		01	QIA.001	Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan	(PN)	6000.00	Produk	1.117.647.000
		02	QIA.002	Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	(PN)	12.00	Laporan	4.521.827.000
Kegiatan		4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor				9.310.689.000	
Indikator Kinerja Kegiatan								
Klasifikasi Rincian Output	9	4125.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	22,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	4.584.510.000		
Rincian Output		01	BAH.001	Keputusan Hasil Pengawalan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan		layanan	2.084.510.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 3

Pelayanan Publik Lainnya					layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	
02	BAH.002	Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO		5.00	layanan	2.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	4125.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	84,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	2.620.303.000
Rincian Output		01	QAH.001	Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	(PN)	84.00
Klasifikasi Rincian Output	11	4125.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	150,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	2.105.876.000
Rincian Output		01	QIC.001	Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	(PN)	150.00
Kegiatan		4127	Registrasi Obat			12.654.921.000
Indikator Kinerja Kegiatan						
Klasifikasi Rincian Output	12	4127.ACA	Perizinan Produk	1,00	Produk, Keputusan	1.000.000.000
Rincian Output		01	ACA.001	Pengawalan obat pengembangan baru yang sesuai standar		1.00
Klasifikasi Rincian Output	13	4127.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	4.000.000.000
Rincian Output		01	BAH.001	Layanan Publik Registrasi Obat yang Prima		1.00
Klasifikasi Rincian Output	14	4127.PCA	Perizinan Produk	7.500,00	Produk, Keputusan	7.654.921.000
Rincian Output		01	PCA.001	Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	(PN)	7500.00

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 4

Perizinan Produk

Produk, Keputusan

Kegiatan	4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	7.162.179.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:		
Klasifikasi Rincian Output	15	4131.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	50,00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian 2.905.490.000
Rincian Output	01	ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Produksi, Distribusi, Khasiat, Keamanan dan Mutu Obat yang diselesaikan	50,00 Rekomendasi Kebijakan 2.905.490.000
Klasifikasi Rincian Output	16	4131.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8,00 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar 2.813.864.000
Rincian Output	01	AFA.001 Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun	8,00 NSPK 2.813.864.000
Klasifikasi Rincian Output	17	4131.CAB Sarana Bidang Kesehatan	3,00 Paket, Unit 31.825.000
Rincian Output	01	CAB.001 Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3,00 Unit 31.825.000
Klasifikasi Rincian Output	18	4131.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	55,00 Unit 1.411.000.000
Rincian Output	01	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	55,00 Unit 1.411.000.000

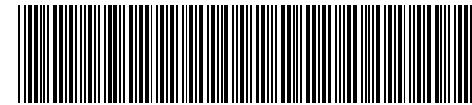
Jakarta, 02 Desember 2024
 Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
 Jayadi
 NRP. 69120503

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0174-8192-0003-3916

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I B. 1

				Ket :		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	50.358.861.000		a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	36.752.204.000		(2) RPLN		US\$	0 Rp.
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN		US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUNINI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING				
	1. Pinjaman Luar Negeri	2. Hibah Luar Negeri	3. Pinjaman Dalam Negeri	4. Hibah Dalam Negeri	1) Mata Uang NPP/H	2) Ekuivalen USD	3) Ekuivalen Rupiah	1) PP	2) PL	3) RK	4) LC
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0174-8192-0003-3916

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : II. 1

Kewenangan : (KP)

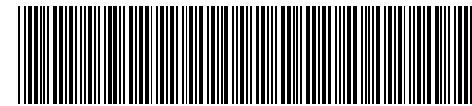
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	-	48.656.036	1.702.825	-	-	50.358.861		
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	-	48.656.036	1.702.825	-	-	50.358.861		
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	-	3.223.069	-	-	-	3.223.069		
3165.BKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.223.069	-	-	-	3.223.069	01 . 51	
01	RM	-	2.442.811	-	-	-	2.442.811	175@	
04	PNBP	-	780.258	-	-	-	780.258	175@	
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan	-	6.592.731	100.000	-	-	6.692.731		
4122.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.305.000	-	-	-	2.305.000	01 . 51	
01	RM	-	2.305.000	-	-	-	2.305.000	175@	
4122.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	681.046	100.000	-	-	781.046	01 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0174-8192-0003-3916

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : II. 2

Kewenangan : (KP)

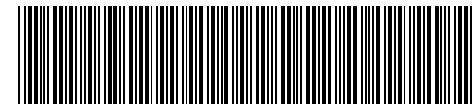
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM		-	207.638	-	-	-	207.638	175@
04	PNBP		-	473.408	100.000	-	-	573.408	175@
4122.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	3.606.685	-	-	-	3.606.685	01 . 51
01	RM		-	2.519.164	-	-	-	2.519.164	175@
04	PNBP		-	1.087.521	-	-	-	1.087.521	175@
4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		-	11.255.272	60.000	-	-	11.315.272	
4123.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	747.994	-	-	-	747.994	01 . 51
01	RM		-	582.787	-	-	-	582.787	175@
04	PNBP		-	165.207	-	-	-	165.207	175@
4123.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	2.427.804	-	-	-	2.427.804	01 . 51
01	RM		-	1.547.307	-	-	-	1.547.307	175@

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0174-8192-0003-3916

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : II. 3

Kewenangan : (KP)

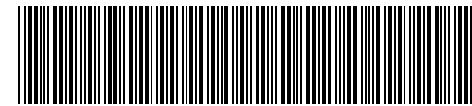
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP			880.497				880.497	
4123.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	2.500.000				2.500.000	01 . 51
01	RM		-	2.260.987				2.260.987	175@
04	PNBP			239.013				239.013	175@
4123.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	5.579.474	60.000			5.639.474	01 . 51
01	RM		-	4.621.608	60.000			4.681.608	175@
04	PNBP			957.866				957.866	175@
4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor		-	9.310.689				9.310.689	
4125.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	4.584.510				4.584.510	01 . 51
01	RM		-	3.954.443				3.954.443	175@
04	PNBP		-	630.067				630.067	175@

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0174-8192-0003-3916

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : II. 4

Kewenangan : (KP)

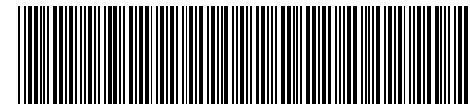
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4125.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	2.620.303	-	-	-	2.620.303	01 . 51
01	RM		-	904.170	-	-	-	904.170	175@
04	PNBP		-	1.716.133	-	-	-	1.716.133	175@
4125.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	2.105.876	-	-	-	2.105.876	01 . 51
01	RM		-	2.105.876	-	-	-	2.105.876	175@
4127	Registrasi Obat		-	12.554.921	100.000	-	-	12.654.921	
4127.ACA	Perizinan Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 51
01	RM		-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	175@
4127.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	3.900.000	100.000	-	-	4.000.000	01 . 51
01	RM		-	3.900.000	100.000	-	-	4.000.000	175@

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0174-8192-0003-3916

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : II. 5

Kewenangan : (KP)

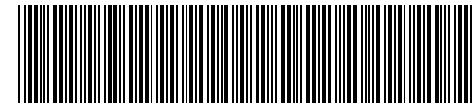
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4127.PCA	Perizinan Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	7.654.921	-	-	-	7.654.921	01 . 51
01	RM		-	1.564.586	-	-	-	1.564.586	175@
04	PNBP		-	6.090.335	-	-	-	6.090.335	175@
4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		-	5.719.354	1.442.825	-	-	7.162.179	
4131.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	2.905.490	-	-	-	2.905.490	01 . 51
01	RM		-	2.898.405	-	-	-	2.898.405	175@
04	PNBP		-	7.085	-	-	-	7.085	175@
4131.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	2.813.864	-	-	-	2.813.864	01 . 51
01	RM		-	2.813.864	-	-	-	2.813.864	175@
4131.CAB	Sarana Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	-	31.825	-	-	31.825	01 . 51

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0174-8192-0003-3916

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : II. 6

Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

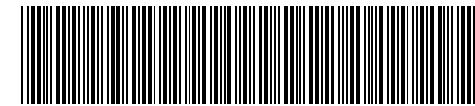
KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM		-	-	9.780	-	-	9.780	175@
04	PNBP		-	-	22.045	-	-	22.045	175@
4131.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	-	1.411.000	-	-	1.411.000	01 . 51
01	RM		-	-	953.778	-	-	953.778	175
04	PNBP		-	-	457.222	-	-	457.222	175
JUMLAH		-	48.656.036	1.702.825	-	-	50.358.861		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POMttd.
Jayadi
NRP. 69120503

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0174-8192-0003-3916

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

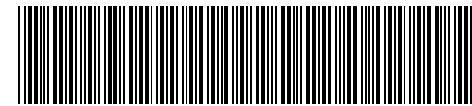
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF														
		RENCANA PENARIKAN DANA	23.130	573.211	1.313.811	971.751	1.494.190	2.527.273	4.446.035	3.988.767	2.467.597	2.406.552	3.863.585	26.282.960	50.358.861	
		BELANJA BARANG	23.130	573.211	1.313.811	971.751	1.489.835	2.069.839	4.238.689	3.238.193	2.458.597	2.402.197	3.758.850	26.117.933	48.656.036	
063.01.DR.3165		BELANJA MODAL	0	0	0	0	4.354	457.434	207.346	750.574	9.000	4.354	104.735	165.027	1.702.825	
		Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	7.738	162.503	348.608	84.673	109.277	171.244	167.266	100.956	153.438	137.867	224.919	1.554.582	3.223.069	
063.01.DR.4122		52 BELANJA BARANG DAN JASA	7.738	162.503	348.608	84.673	109.277	171.244	167.266	100.956	153.438	137.867	224.919	1.554.582	3.223.069	
		Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	0	70.877	88.399	129.029	121.126	264.544	128.080	183.498	265.366	177.785	334.346	4.929.681	6.692.731	
063.01.DR.4123		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	70.877	88.399	129.029	121.126	264.544	128.080	183.498	265.366	177.785	234.346	4.929.681	6.592.731	
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	
063.01.DR.4125		Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	15.393	60.632	191.291	241.553	269.510	294.415	184.939	141.203	167.426	157.380	1.425.578	8.165.954	11.315.272	
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	15.393	60.632	191.291	241.553	265.155	290.060	184.939	141.203	167.426	153.025	1.420.843	8.123.752	11.255.272	
063.01.DR.4127		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	4.354	4.354	0	0	0	4.354	4.735	42.202	60.000	
		Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	0	217.594	213.033	124.290	233.283	202.457	2.733.619	1.862.138	931.069	931.069	931.069	931.069	931.069	9.310.689
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	217.594	213.033	124.290	233.283	202.457	2.733.619	1.862.138	931.069	931.069	931.069	931.069	931.069	9.310.689
		Registrasi Obat	0	49.211	400.101	314.304	704.444	1.021.594	760.417	773.778	761.109	814.868	773.569	6.281.527	12.654.921	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0174-8192-0003-3916

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
063.01.DR.4131	52 BELANJA BARANG DAN JASA		0	49.211	400.101	314.304	704.444	1.021.594	760.417	773.778	761.109	814.868	773.569	6.181.527	12.554.921
	53 BELANJA MODAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		0	12.394	72.378	77.903	56.550	573.021	471.714	927.196	189.189	187.583	174.104	4.420.146	7.162.179
	52 BELANJA BARANG DAN JASA		0	12.394	72.378	77.903	56.550	119.941	264.368	176.622	180.189	187.583	174.104	4.397.321	5.719.354
	53 BELANJA MODAL		0	0	0	0	0	453.080	207.346	750.574	9.000	0	0	22.825	1.442.825
	PERKIRAAN PENERIMAAN		3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.110	46.129.100
	- PNBP (425321)		553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	6.636.000
	- PNBP (425321)		2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.849	34.546.100
	- PNBP (425321)		246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.424	2.957.000
	- PNBP (425321)		165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.837	1.990.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POMttd.
Jayadi
NRP. 69120503

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

IV A. B L O K I R



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 1

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.650 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 36.386.367	Disposisi: 524114	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 36.363.542		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	53 Belanja Modal Rp. 22.825		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.379 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Disposisi: 524114	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNPB)
3165.BKB	Pemantauan produk		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.921 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)	Disposisi: 524119	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.260		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 341.248 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: 524119	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNPB)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.206		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 249.320 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: 524219	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.319 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.020	Disposisi: 524219	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNPB)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 176.057 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNPB)	Disposisi: 524219	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.825		Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNPB)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 176.057 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: 524219	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNPB)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.600		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 176.057 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: 524219	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNPB)
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNPB)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 176.057 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

IV A. B L O K I R



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 2

(dalam ribuan rupiah)

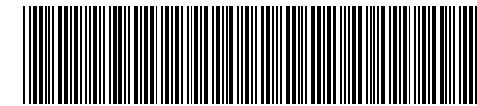
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN																																																																																																											
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor																																																																																																													
4122.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan <table> <tr> <td>521211</td><td>Belanja Bahan(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 119.882</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td><td>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>522151</td><td>Belanja Jasa Profesi(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 47.600</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td><td>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>522191</td><td>Belanja Jasa Lainnya(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 212.019</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td><td>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>524111</td><td>Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 420.594</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td colspan="3">Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</td><td>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>524113</td><td>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 28.680</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td colspan="3">Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</td><td>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>524114</td><td>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 1.077.160</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td colspan="3">Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</td><td>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>524119</td><td>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 399.065</td><td></td><td>Belanja Bahan(RM)</td></tr> <tr> <td colspan="3">Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</td><td></td></tr> </table>	521211	Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 119.882		Tidak Dapat Dicairkan	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			522151	Belanja Jasa Profesi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 47.600		Tidak Dapat Dicairkan	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 212.019		Tidak Dapat Dicairkan	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 420.594		Tidak Dapat Dicairkan	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 28.680		Tidak Dapat Dicairkan	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 1.077.160		Tidak Dapat Dicairkan	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 399.065		Belanja Bahan(RM)	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
521211	Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 119.882		Tidak Dapat Dicairkan																																																																																																											
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																													
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 47.600		Tidak Dapat Dicairkan																																																																																																											
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																													
522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 212.019		Tidak Dapat Dicairkan																																																																																																											
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																													
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 420.594		Tidak Dapat Dicairkan																																																																																																											
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																													
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 28.680		Tidak Dapat Dicairkan																																																																																																											
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																													
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 1.077.160		Tidak Dapat Dicairkan																																																																																																											
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																													
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 399.065		Belanja Bahan(RM)																																																																																																											
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024																																																																																																														
		4122.QAH	Pelayanan Publik Lainnya <table> <tr> <td>521211</td><td>Belanja Bahan(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 5.208</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td><td>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>521211</td><td>Belanja Bahan(PNBP)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 3.609</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td><td>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>524111</td><td>Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 36.781</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td><td>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>524114</td><td>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 26.640</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td><td>Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>4122.QIC</td><td> Pengawasan dan Pengendalian Lembaga <table> <tr> <td>521111</td><td>Belanja Keperluan Perkantoran(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 28.400</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td>A</td><td></td><td></td><td>A</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>521119</td><td>Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 259</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td>A</td><td></td><td></td><td>A</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>521211</td><td>Belanja Bahan(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> </table> </td></tr> </table>	521211	Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 5.208		Tidak Dapat Dicairkan	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			521211	Belanja Bahan(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 3.609		Tidak Dapat Dicairkan	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 36.781		Tidak Dapat Dicairkan	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 26.640		Tidak Dapat Dicairkan	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya					4122.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga <table> <tr> <td>521111</td><td>Belanja Keperluan Perkantoran(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 28.400</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td>A</td><td></td><td></td><td>A</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>521119</td><td>Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 259</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td>A</td><td></td><td></td><td>A</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>521211</td><td>Belanja Bahan(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> </table>	521111	Belanja Keperluan Perkantoran(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 28.400		Tidak Dapat Dicairkan	A			A	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			521119	Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 259		Tidak Dapat Dicairkan	A			A	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			521211	Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
521211	Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 5.208		Tidak Dapat Dicairkan																																																																																																											
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																													
521211	Belanja Bahan(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 3.609		Tidak Dapat Dicairkan																																																																																																											
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																													
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 36.781		Tidak Dapat Dicairkan																																																																																																											
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																													
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 26.640		Tidak Dapat Dicairkan																																																																																																											
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																													
		4122.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga <table> <tr> <td>521111</td><td>Belanja Keperluan Perkantoran(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 28.400</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td>A</td><td></td><td></td><td>A</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>521119</td><td>Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dicairkan</td><td>Rp. 259</td><td></td><td>Tidak Dapat Dicairkan</td></tr> <tr> <td>A</td><td></td><td></td><td>A</td></tr> <tr> <td>Disposisi:</td><td colspan="3">Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> <tr> <td>521211</td><td>Belanja Bahan(RM)</td><td></td><td>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</td></tr> </table>	521111	Belanja Keperluan Perkantoran(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 28.400		Tidak Dapat Dicairkan	A			A	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			521119	Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 259		Tidak Dapat Dicairkan	A			A	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			521211	Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 28.400		Tidak Dapat Dicairkan																																																																																																											
A			A																																																																																																											
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																													
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											
Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 259		Tidak Dapat Dicairkan																																																																																																											
A			A																																																																																																											
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																													
521211	Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya																																																																																																											

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

IV A. B L O K I R



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 3

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
	Tidak Dapat Dicairkan A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(PNBP)	Rp. 48.447	Tidak Dapat Dicairkan A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)	Rp. 142.000
	Tidak Dapat Dicairkan A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	Rp. 136.941	Tidak Dapat Dicairkan A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Rp. 10.000
	Tidak Dapat Dicairkan A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)	Rp. 18.000	Tidak Dapat Dicairkan A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	Rp. 511.012
	Tidak Dapat Dicairkan A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	Rp. 26.920	Tidak Dapat Dicairkan A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	Rp. 174.835
	Tidak Dapat Dicairkan A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Rp. 19.000	Tidak Dapat Dicairkan A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	Rp. 8.640
	Tidak Dapat Dicairkan A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 26.900	Tidak Dapat Dicairkan A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Rp. 5.700
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)	Rp. 217.727	Tidak Dapat Dicairkan A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)	Rp. 79.000
	Tidak Dapat Dicairkan A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

IV A. B L O K I R



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 4

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 231.362 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP) Rp. 2.050
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Rp. 403.087		Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi 522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Rp. 35.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.453 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Rp. 59.156
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Rp. 126.644		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Rp. 6.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.291 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Rp. 282.372
4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Eksport Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	4123.BAH	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi 521211 Belanja Bahan(RM) Rp. 73.897
	Pelayanan Publik Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(PNBP) Rp. 2.050
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.291 Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi 521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Rp. 25.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Rp. 187.736		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Rp. 187.736
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.291 Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi 521211 Belanja Bahan(RM) Rp. 187.736
		4123.BIA	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi 521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Rp. 25.000
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Rp. 187.736

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

IV A. B L O K I R



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 5

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.640 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 282.192 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.250 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.000 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 115.662 Efisiensi	4123.BIB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 74.070 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.098 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 337.990 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.050 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.990 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.500 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 654.085 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.600 Efisiensi

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

IV A. B L O K I R



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 6

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.000 Efisiensi	4123.QIA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Pengawasan dan Pengendalian Produk 521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 400.000 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.955 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.944 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 767.368 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.100 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.000 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 101.550 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.000 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.400 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.237.209 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 415.687 Efisiensi

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

IV A. B L O K I R



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 7

(dalam ribuan rupiah)

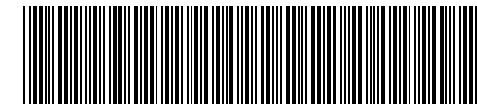
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 161.700 Efisiensi		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.307 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 237.432 Efisiensi		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.525 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.270 Efisiensi		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 166.100 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.250.485 Efisiensi		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 244.637 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.566.035 Efisiensi		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.690 Efisiensi
4125	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.141.100 Efisiensi
4125.BAH	Pelayanan Publik Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 132.579 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.278		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 253.808 Efisiensi

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

IV A. B L O K I R



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 8

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		522141 Belanja Sewa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.102.932		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 209.544		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 950.200		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.000
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4125.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.245		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 216.271
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.150		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.590
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.252		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.680
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.869		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

IV A. B L O K I R



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 9

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 369.864		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 531.258
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 293.855		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.260
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.088		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 228.080
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.700		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 703.950
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 174.300		Registrasi Obat
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Perizinan Produk
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM)
	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 85.040
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 176.160		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
4125.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.000
	521211 Belanja Bahan(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV. A. B L O K I R



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 10

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 291.200 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 208.440 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522112 Belanja Langganan Telepon(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.640 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.082.200 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 194.680 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 395.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Pelayanan Publik Lainnya 521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 92.400 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 344.300 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 203.700 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

IV A. B L O K I R



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 11

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4127.PCA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.670.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Perizinan Produk 521111 Belanja Keperluan Perkantoran(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.700 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 833.048 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.534 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 785.784 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 61.519 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 463.465 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 547.085 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.775 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 186.322 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.080 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

IV A. B L O K I R



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 12

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.150 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 307.375 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 260.595 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 203.907 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.700 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 927.021 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 110.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 52.046 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 320.915 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 162.665 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.085 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4131	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 367.500 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
4131.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan 521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

IV A. B L O K I R



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 13

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 456.600 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 509.850 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 555.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.115 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.200 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 155.214 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 260.039 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 239.520 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.950 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 933.060 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 101.940 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Sarana Bidang Kesehatan 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 780 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 14

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	<p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.045 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p>		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

tt.
Jayadi
NRP. 69120503

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0174-8192-0003-3916

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

tt.
Jayadi
NRP. 69120503